



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tanjungpandan, Juni 2025

Jl. Anwar Tanjungpandan 33412, Telp/Fax 0719-21044
website: <http://setwan.belitung.go.id>





BUPATI BELITUNG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG
NOMOR: 100.3.4/530.A/KEP/BAPPEDA/2025

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6951);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah

9. Peraturan...

Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 95);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 96);
10. Peraturan Bupati Belitung Nomor 70 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 71);
11. Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menjadi acuan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

KETIGA : Memerintahkan Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

KEEMPAT:...

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

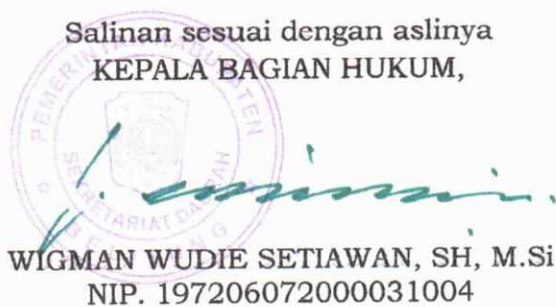
Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI BELITUNG,

ttd.

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WIGMAN WUDIE SETIAWAN, SH, M.Si
NIP. 197206072000031004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG
NOMOR: 100.3.4/530.A/KEP/BAPPEDA/2025
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG

**DAFTAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**

1. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
2. Perubahan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Perubahan Renja Inspektorat;
4. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
8. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
9. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
12. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
13. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
14. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
16. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
17. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
18. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian;
19. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
20. Perubahan Renja Dinas Perikanan;
21. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
22. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
23. Perubahan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
24. Perubahan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga;
25. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja;
26. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
27. Perubahan Renja Kecamatan Tanjungpandan;
28. Perubahan Renja Kecamatan Badau;
29. Perubahan Renja Kecamatan Sijuk;
30. Perubahan Renja Kecamatan Membalong; dan
31. Perubahan Renja Kecamatan Selat Nasik.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WIGMAN WUDIE SETIAWAN, SH, M.Si
NIP. 197206072000031004

BUPATI BELITUNG,

ttd.

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan Rahmat Karunia-Nya sehingga Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 telah dapat dilakukan. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung ini dilakukan dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Tahun 2025.

Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Adapun muatan Program dan Kegiatan Renja berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun 2025 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman, acuan dan tolak ukur dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan selama periode waktu 1 tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Tanjungpandan, Juni 2025
Sekretaris DPRD
Kabupaten Belitung,

IMAM FADLLI, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197109152001121002

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
 BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN	 6
1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan sampai dengan Triwulan I Tahun Berkenaan	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	26
 BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	28
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	28
3.2 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Pendanaan	29
 BAB IV. PENUTUP	31
 LAMPIRAN	
Matrik Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun 2025	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Penyusun Renja,
2. Penyiapan data dan informasi,
3. Penyusunan rancangan awal,
4. Perumusan rancangan,
5. Verifikasi rancangan,
6. Perumusan rancangan akhir,
7. Verifikasi rancangan akhir, dan
8. Penetapan Renja melalui Peraturan Kepala Daerah.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung sesuai dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 dengan berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 dan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2025. Rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun 2025 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan

indikator kinerja serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung.

Program kegiatan yang termuat pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah harus selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dokumen Renja ini akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan selanjutnya akan menjadi bahan dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Rencana Kerja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Rencana Kerja maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2444, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 1);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah

- Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 47);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
 18. Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 14);
 19. Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 20);
 20. Peraturan Bupati Belitung Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 39);
 21. Peraturan Bupati Belitung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025;
 22. Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 20);
 23. Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 Nomor 14).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran yang merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung tahun 2024-2026. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai reviu pelaksanaan program/kegiatan tahun berkenaan

pada anggaran induk yang selanjutnya dijadikan perbaikan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan RKA Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun 2025.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah untuk:

1. Menyelaraskan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan Perubahan RKPD Tahun 2025;
2. Sebagai pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
3. Menjadi kerangka dasar bagi perangkat daerah dalam upayanya melaksanakan pelayanan;
4. Menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab. I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun 2025.

Bab. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Bab. III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, daftar rencana program kegiatan dan sub kegiatan beserta pendanaan.

Bab. IV PENUTUP

Memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung.

BAB II

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN SEMESTER I TAHUN BERKENAAN**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun 2025 merupakan penjabaran pelaksanaan tahun ke 2 dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Sedangkan pelaksanaan Renja tahun lalu (Tahun 2024) merupakan pencapaian tahun ke 1 Rencana Strategis. Pencapaian pelayanan perangkat daerah Tahun 2024 berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung dapat digambarkan sebagai berikut:

Capaian Kinerja Sasaran / IKU Tahun 2024

No	Sasaran Strategis/ IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Pelayanan Sekretariat DPRD yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,35	3,55	105,97
2	Meningkatnya Dukungan Layanan dan Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan DPRD	Persen	100%	91,50%	91,50

Hasil pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung atas sasaran strategis “Terwujudnya Pelayanan Sekretariat DPRD yang Berkualitas” dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 tercapai sebesar 3,55 dari target yang ditetapkan sebesar 3,35 atau 105,97% dengan kategori kinerja “Sangat Baik” (A). Nilai indikator indeks kepuasan masyarakat tersebut telah melampaui target yang ditetapkan dan sama dengan nilai IKM Tahun 2023 yaitu sebesar 3,55.

Hasil pengukuran kinerja atas sasaran strategis “Meningkatnya Dukungan Layanan dan Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD” dengan indikator kinerja Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan DPRD Tahun 2024 tercapai sebesar 91,50% dari target yang ditetapkan. Capaian indikator kinerja ini belum mencapai target dan tidak diperbandingkan dengan capaian Tahun 2023 karena indikator kinerja dan rumusan perhitungan yang berbeda.

Sedangkan capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun 2024 sebagaimana dimuat dalam tabel berikut ini:

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024
TRIWULAN IV
Sekretariat DPRD

P

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
			4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Semua Bidang																									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (persen)	0,00		100,00		100										-		0,00%						Sekretariat DPRD	
			Indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah (persen)	0,00		75,73		75,44										-		0,00%							
			Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah (persen)	0,00		100,00	20.767.233.835	100	25.040.017.118	4.777.729.901	5.052.211.253	5.079.308.557	6.442.310.318	21.351.560.029	85,27%	42.118.793.864	0,00%										
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (persen)	0,00		88,89		100										-		0,00%							
			Persentase Pelayanan Administrasi DPRD (persen)	0,00		94,00		100										-		0,00%							
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)			-	0,00	7.470.300	10	9.570.000	3	-	1	1.040.600	2	-	4	6.918.600	10	7.959.200	100,00%	83,17%	0,00	15.429.500	0,00%	0,00%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			-	0,00	1.393.400	3	1.900.000	-	-	1	-	1	-	1	1.338.000	3	1.338.000	100,00%	70,42%	3,00	2.731.400	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)			-	0,00	2.220.000	1	2.200.000	-	-	-	-	-	-	1	1.974.000	1	1.974.000	100,00%	89,73%	1,00	4.194.000	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)			-	0,00	1.032.500	1	1.300.000	-	-	-	-	1	-	-	1.232.800	1	1.232.800	100,00%	94,83%	1,00	2.265.300	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)			-	0,00	966.000	1	2.170.000	1	-	-	1.040.600	-	-	-	763.000	1	1.803.600	100,00%	83,12%	1,00	2.769.600	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)			-	0,00	853.000	1	1.000.000	-	-	-	-	-	-	1	853.000	1	853.000	100,00%	85,30%	1,00	1.706.000	0,00%	0,00%	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)			-	0,00	1.005.400	3	1.000.000	2	-	-	-	-	-	1	757.800	3	757.800	100,00%	75,78%	3,00	1.763.200	0,00%	0,00%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen keuangan Perangkat Daerah (Dokumen)			-	0,00	3.445.346.570	4	3.968.561.000	2	920.769.595	-	1.109.071.815	1	800.580.104	1	954.608.443	4	3.785.029.957	100,00%	95,38%	0,00	7.230.376.527	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)			-	0,00	3.443.218.300	24	3.966.366.000	8	920.769.595	24	1.109.071.815	24	800.580.104	40	952.613.243	24	3.783.034.757	100,00%	95,38%	24,00	7.226.253.057	0,00%	0,00%	

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		-	0,00	1.070.300	1	1.195.000	1	-	-	-	-	-	1.121.200	1	1.121.200	100,00%	93,82%	1,00	2.191.500	0,00%	0,00%		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		-	0,00	1.057.970	2	1.000.000	-	-	-	-	1	-	1	874.000	2	874.000	100,00%	87,40%	2,00	1.931.970	0,00%	0,00%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah (Orang)		-	0,00	146.744.866	24	283.875.000	24	49.243.562	24	42.881.252	24	48.522.356	24	101.245.226	24	241.892.396	100,00%	85,21%	0,00	388.637.262	0,00%	0,00%	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		-	0,00	11.385.000	1	13.875.000	-	-	-	-	-	-	1	11.000.000	1	11.000.000	100,00%	79,28%	1,00	22.385.000	0,00%	0,00%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		-	0,00	135.359.866	24	270.000.000	6	49.243.562	7	42.881.252	1	48.522.356	10	90.245.226	24	230.892.396	100,00%	85,52%	24,00	366.252.262	0,00%	0,00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah (Persen)		-	0,00	1.010.672.836	100	1.429.006.118	25	121.479.422	25	237.583.232	25	331.321.546	25	499.338.124	100	1.189.722.324	100,00%	83,26%	0,00	2.200.395.160	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	30.515.000	1	70.000.000	1	-	1	930.000	1	9.728.000	1	22.192.000	1	32.850.000	100,00%	46,93%	1,00	63.365.000	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	94.989.000	2	156.957.218	2	-	2	20.897.000	2	33.675.000	2	73.190.000	2	127.762.000	100,00%	81,40%	2,00	222.751.000	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		-	0,00	53.778.500	1	60.000.000	1	4.195.000	1	8.886.000	1	16.780.000	1	24.225.000	1	54.086.000	100,00%	90,14%	1,00	107.864.500	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	597.429.650	2	837.048.900	2	75.124.600	2	137.961.500	2	182.232.500	2	285.465.800	2	680.784.400	100,00%	81,33%	2,00	1.278.214.050	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		-	0,00	71.672.000	1	85.000.000	1	-	1	14.152.900	1	25.021.700	1	40.600.800	1	79.775.400	100,00%	93,85%	1,00	151.447.400	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		-	0,00	59.790.000	1	70.000.000	1	6.600.000	1	18.570.000	1	15.630.000	1	28.810.000	1	69.610.000	100,00%	99,44%	1,00	129.400.000	0,00%	0,00%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0,00	102.498.686	12	150.000.000	3	35.559.822	3	36.185.832	3	48.254.346	3	24.854.524	12	144.854.524	100,00%	96,57%	12,00	247.353.210	0,00%	0,00%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang milik daerah (Jenis)		-	0,00	39.400.000	3	2.583.040.000	-	-	-	-	-	-	2	178.000.000	2	178.000.000	66,67%	6,89%	0,00	217.400.000	0,00%	0,00%	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		-	0,00	-	3	2.400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		-	0,00	-	25	143.040.000	-	-	-	-	-	-	25	141.000.000	25	141.000.000	100,00%	98,57%	25,00	141.000.000	0,00%	0,00%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	0,00	39.400.000	1	40.000.000	-	-	-	-	-	-	1	37.000.000	1	37.000.000	100,00%	92,50%	1,00	76.400.000	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran (Persen)		-	0,00	1.120.134.172	100	1.190.955.000	25	277.527.302	25	271.817.618	25	280.904.337	25	286.208.201	100	1.116.457.458	100,00%	93,74%	0,00	2.236.591.630	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		-	0,00	2.064.000	12	3.000.000	3	500.000	3	500.000	3	500.000	3	500.000	12	2.000.000	100,00%	66,67%	12,00	4.064.000	0,00%	0,00%	

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	294.144.872	12	358.500.000	3	69.663.552	3	63.953.868	3	73.040.587	3	78.344.451	12	285.002.458	100,00%	79,50%	12,00	579.147.330	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	823.925.300	12	829.455.000	3	207.363.750	3	207.363.750	3	207.363.750	3	207.363.750	12	829.455.000	100,00%	100,00%	12,00	1.653.380.300	0,00%	0,00%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah dalam kondisi baik (Jenis)		-	0,00	722.999.700	4	597.650.000	2	3.465.000	4	168.958.300	4	61.807.000	4	259.055.400	4	493.285.700	100,00%	82,54%	0,00	1.216.285.400	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		-	0,00	83.564.700	17	141.000.000	17	3.465.000	17	12.319.300	17	7.382.000	17	63.345.400	17	86.511.700	100,00%	61,36%	17,00	170.076.400	0,00%	0,00%	
		Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		-	0,00	49.390.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	49.390.000	0,00%	0,00%		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	0,00	106.735.000	150	132.650.000	30	-	30	8.750.000	33	54.425.000	57	45.710.000	150	108.885.000	100,00%	82,08%	150,00	215.620.000	0,00%	0,00%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		-	0,00	483.310.000	2	324.000.000	1	-	-	147.889.000	-	-	1	150.000.000	2	297.889.000	100,00%	91,94%	2,00	781.199.000	0,00%	0,00%	
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersedianya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD (Persen)		-	0,00	13.830.239.391	100	14.341.250.000	25	3.399.545.020	25	3.152.703.436	25	3.283.034.766	25	3.942.876.324	100	13.778.159.546	100,00%	96,07%	0,00	27.608.398.937	0,00%	0,00%	
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	*Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)		-	0,00	13.358.512.652	25	13.353.750.000	8	3.383.463.196	25	3.139.863.196	25	3.283.034.766	42	3.247.604.486	25	13.053.965.644	100,00%	97,76%	25,00	26.412.478.296	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)		-	0,00	247.500.000	5	440.000.000	-	-	-	12.840.240	1	-	4	405.500.000	5	418.340.240	100,00%	95,08%	5,00	665.840.240	0,00%	0,00%	
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)		-	0,00	224.226.739	25	547.500.000	-	16.081.824	-	-	-	-	21	289.771.838	21	305.853.662	84,00%	55,86%	21,00	530.080.401	0,00%	0,00%	
		Layanan Administrasi DPRD	Tersedianya layanan administrasi DPRD (Persen)		-	0,00	444.226.000	100	636.110.000	-	5.700.000	17	68.155.000	83	273.138.448	17	214.060.000	117	561.053.448	116,67%	88,20%	0,00	1.005.279.448	0,00%	0,00%	
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)		-	0,00	444.226.000	6	636.110.000	-	5.700.000	1	68.155.000	5	273.138.448	1	214.060.000	7	561.053.448	100,00%	88,20%	7,00	1.005.279.448	0,00%	0,00%	
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	90,07%	85,27%					
																			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi					
		SEKRETARIAT DPRD																								
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (%)	0,00	-	100,00	13.199.301.810	100	24.818.754.460		4.565.032.129		6.190.880.946		6.346.970.961		2.417.425.262	-	19.520.309.298	0,00%	78,65%		32.719.611.108		0,00%	Sekretariat DPRD
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD (Dokumen)		-	0,00	1.710.061.732	12	4.277.500.000	-	145.368.728	2	1.161.208.940	8	811.741.649	1	179.954.944	11	2.298.274.261	91,67%	53,73%	0,00	4.008.335.993	0,00%	0,00%	
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)		-	0,00	716.727.004	2	1.397.500.000	-	145.368.728	-	98.834.434	1	128.519.210	-	169.379.944	1	542.102.316	50,00%	38,79%	1,00	1.258.829.320	0,00%	0,00%	
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)		-	0,00	993.334.728	10	2.880.000.000	-	-	2	1.062.374.506	7	683.222.439	1	10.575.000	10	1.756.171.945	100,00%	60,98%	10,00	2.749.506.673	0,00%	0,00%	
		Peningkatan Kapasitas DPRD	Laporan hasil peningkatan kapasitas DPRD ()		-	0,00	2.338.500.757	12	4.678.904.460	3	611.850.735	3	700.325.331	3	270.630.809	3	1.289.498.542	12	2.872.305.417	100,00%	61,39%	0,00	5.210.806.174	0,00%	0,00%	

		Orientasi DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)		-	0,00	-	25	709.980.790	-	-	-	-	-	25	574.122.819	25	574.122.819	100,00%	80,86%	25,00	574.122.819	0,00%	0,00%				
		Pendalaman Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)		-	0,00	1.497.046.297	75	2.975.769.210	22	474.893.475	30	436.905.361	-	87.967.194	28	410.712.108	80	1.410.478.138	100,00%	47,40%	80,00	2.907.524.435	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	*Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)		-	0,00	293.476.260	7	293.476.260	7	48.912.710	7	97.825.420	7	73.369.065	7	73.369.065	7	293.476.260	100,00%	100,00%	7,00	586.952.520	0,00%	0,00%			
		Publikasi dan Dokumentasi DPRD	*Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)		-	0,00	547.978.200	12	699.678.200	3	88.044.550	3	165.594.550	3	109.294.550	3	231.294.550	12	594.228.200	100,00%	84,93%	12,00	1.142.206.400	0,00%	0,00%			
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Pokok-pokok Pikiran DPRD (Dokumen)		-	0,00	343.800.000	1	310.550.000	1	94.810.000	1	3.750.000	1	-	1	94.419.000	1	192.979.000	100,00%	62,14%	0,00	536.779.000	0,00%	0,00%			
		Kunjungan Kerja dalam Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)		-	0,00	-	12	8.500.000	-	-	-	-	-	5	150.000	5	150.000	41,67%	1,76%	5,00	150.000	0,00%	0,00%				
		Pelaksanaan Reses	*Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)		-	0,00	343.800.000	2	302.050.000	1	94.810.000	-	3.750.000	-	-	1	94.269.000	2	192.829.000	100,00%	63,84%	2,00	536.629.000	0,00%	0,00%			
		Fasilitasi Tugas DPRD	Laporan Fasilitasi Tugas DPRD (Dokumen)		-	0,00	8.806.939.321	12	15.551.800.000	3	3.713.002.666	3	4.325.596.675	3	5.264.598.503	3	853.552.776	12	14.156.750.620	100,00%	91,03%	0,00	22.963.689.941	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)		-	0,00	8.806.939.321	12	15.551.800.000	3	3.713.002.666	3	4.325.596.675	3	5.264.598.503	3	853.552.776	12	14.156.750.620	100,00%	91,03%	12,00	22.963.689.941	0,00%	0,00%			
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										97,16%	78,65%						
											Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi						
									49.858.771.578	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										93,60%	81,98%							
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Tinggi	Tinggi							

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja :		
Faktor penghambat pencapaian kinerja :		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya**):		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Pada Tahun 2025, pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan pada Renja Tahun 2025 masih sedang berjalan yang terdiri dari 2 program, 13 kegiatan dan 37 sub kegiatan. Adapun jumlah anggaran yang ditetapkan pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp.34.271.829.431,00 dan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp.7.106.043.344,00 atau 20,73% dengan rata-rata kinerja 22,34%.

Capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana dimuat dalam tabel berikut ini.

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Sekretariat DPRD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Semua Bidang																								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (persen)	0,00		100,00		100										50		50,00%		100,00				Sekretariat DPRD
			Indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah (persen)	0,00		85,76		75,44										86		113,68%		75,44				
			Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah (persen)	0,00	-	100,00	21.210.560.029	100	23.884.873.771	4.582.479.250	-	-	-	-	-	-	50	4.582.479.250	50,00%	19,19%	100,00	25.793.039.279	0,00%			
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (persen)	0,00		83,33		100									5		5,00%		100,00					
			Persentase Pelayanan Administrasi DPRD (persen)	0,00		100,00		100									50		50,00%		100,00					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)		-		7.959.200	10	10.645.018	3	-	-	-	-	-	-	3	-	30,00%	0,00%	0,00	7.959.200	0,00%	0,00%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		-	3,00	1.338.000	3	1.876.000	-	-						-	-	0,00%	0,00%	3,00	1.338.000	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)		-	1,00	1.974.000	1	3.312.018	-	-						-	-	0,00%	0,00%	1,00	1.974.000	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		-	1,00	1.232.800	1	1.320.000	-	-						-	-	0,00%	0,00%	1,00	1.232.800	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)		-	1,00	1.803.600	1	2.147.700	1	-						1	-	100,00%	0,00%	2,00	1.803.600	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		-	1,00	853.000	1	971.800	-	-						-	-	0,00%	0,00%	1,00	853.000	0,00%	0,00%		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		-	3,00	757.800	3	1.017.500	2	-						2	-	66,67%	0,00%	5,00	757.800	0,00%	0,00%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen keuangan Perangkat Daerah (Dokumen)		-	4,00	3.785.029.957	4	4.287.899.500	2	883.343.766		-	-	-	-	2	883.343.766	50,00%	20,60%	4,00	4.668.373.723	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		-	24,00	3.783.034.757	29	4.285.750.000	24	883.343.766						6	883.343.766	20,69%	20,61%	30,00	4.666.378.523	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		-	1,00	1.121.200	1	1.173.000	1	-						1	-	100,00%	0,00%	2,00	1.121.200	0,00%	0,00%		

		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)			-	2,00	874.000	2	976.500	-	-						-	-	0,00%	0,00%	2,00	874.000	0,00%	0,00%	
		Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi kepegawain Perangkat Daerah (Orang)			-	24,00	241.892.396	24	155.000.000	24	44.806.590			-	-	-	6	44.806.590	25,00%	28,91%	24,00	286.698.986	0,00%	0,00%	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)			-	1,00	11.000.000	0	-	-	-						-	-	0,00%	0,00%	1,00	11.000.000	0,00%	0,00%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)			-	24,00	230.892.396	20	155.000.000	5	44.806.590						5	44.806.590	25,00%	28,91%	29,00	275.698.986	0,00%	0,00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah (Persen)			-	100,00	1.189.722.324	100	1.337.984.843	25	103.891.903			-	-	-	25	103.891.903	25,00%	7,76%	100,00	1.293.614.227	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)			-	1,00	32.850.000	1	69.983.835	1	-						0	-	25,00%	0,00%	1,25	32.850.000	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)			-	2,00	127.762.000	2	153.513.222	2	4.895.000						1	4.895.000	25,00%	3,19%	2,50	132.657.000	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)			-	1,00	54.086.000	1	59.969.526	1	-						0	-	25,00%	0,00%	1,25	54.086.000	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)			-	2,00	680.784.400	2	837.340.040	2	65.073.000						1	65.073.000	25,00%	7,77%	2,50	745.857.400	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)			-	1,00	79.775.400	1	84.983.820	1	-						0	-	25,00%	0,00%	1,25	79.775.400	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)			-	1,00	69.610.000	1	72.194.400	1	12.515.000						0	12.515.000	25,00%	17,34%	1,25	82.125.000	0,00%	0,00%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			-	12,00	144.854.524	12	60.000.000	3	21.408.903						3	21.408.903	25,00%	35,68%	15,00	166.263.427	0,00%	0,00%	

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis barang milik daerah (Jenis)			-	2,00	37.000.000	1	1.085.632.170	-	-			-	-	-	-	0,00%	0,00%	2,00	37.000.000	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)			-	1,00	37.000.000	113	1.085.632.170	-	-					-	-	0,00%	0,00%	1,00	37.000.000	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran (Persen)			-	100,00	1.116.457.458	100	1.190.907.000	25	269.491.787			-	-	-	25	269.491.787	25,00%	22,63%	100,00	1.385.949.245	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)			-	12,00	2.000.000	12	2.952.000	3	500.000						3	500.000	25,00%	16,94%	15,00	2.500.000	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)			-	12,00	285.002.458	12	358.500.000	3	67.157.737						3	67.157.737	25,00%	18,73%	15,00	352.160.195	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)			-	12,00	829.455.000	12	829.455.000	3	201.834.050						3	201.834.050	25,00%	24,33%	15,00	1.031.289.050	0,00%	0,00%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah dalam kondisi baik (Jenis)			-	4,00	493.285.700	4	784.256.000	2	-			-	-	-	2	-	50,00%	0,00%	4,00	493.285.700	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)			-	17,00	86.511.700	17	128.951.000	17	-						4	-	25,00%	0,00%	21,25	86.511.700	0,00%	0,00%	
		Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)			-	0,00	-	100	50.000.000	-	-						-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)			-	150,00	108.885.000	159	128.005.000	23	-						23	-	14,47%	0,00%	173,00	108.885.000	0,00%	0,00%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			-	2,00	297.889.000	3	477.300.000	-	-						-	-	0,00%	0,00%	2,00	297.889.000	0,00%	0,00%	
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersedianya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD (Persen)			-	100,00	13.778.159.546	100	14.491.350.000	25	3.131.250.204			-	-	-	25	3.131.250.204	25,00%	21,61%	100,00	16.909.409.750	0,00%	0,00%	
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	*Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)			-	25,00	13.053.965.644	25	13.913.100.000	25	3.125.451.214						6	3.125.451.214	25,00%	22,46%	31,25	16.179.416.858	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)			-	5,00	418.340.240	4	360.750.000	-	-						-	-	0,00%	0,00%	5,00	418.340.240	0,00%	0,00%	
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)			-	21,00	305.853.662	25	217.500.000	-	5.798.990						-	5.798.990	0,00%	2,67%	21,00	311.652.652	0,00%	0,00%	
		Layanan Administrasi DPRD	Tersedianya layanan administrasi DPRD (Persen)			-	116,67	561.053.448	100	541.199.240	60	149.695.000			-	-	-	60	149.695.000	60,00%	27,66%	116,67	710.748.448	0,00%	0,00%	
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)			-	7,00	561.053.448	5	541.199.240	3	149.695.000						3	149.695.000	60,00%	27,66%	10,00	710.748.448	0,00%	0,00%	
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						22,67%	19,19%						
													Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		SEKRETARIAT DPRD																								
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (%)	0,00	-	88,70	18.946.186.479	100	10.386.955.660		2.523.564.094		-	-	-	-	50	2.523.564.094	50,00%	24,30%	100,00	21.469.750.573		0,00%	Sekretariat DPRD	

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja :	
Faktor penghambat pencapaian kinerja :	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya**):	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Jenis pelayanan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung untuk mendukung kinerja DPRD adalah pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sebagaimana tersebut di atas baik itu layanan administrasi keuangan dan kesejahteraan DPRD, penyediaan sarana dan prasarana, administrasi rapat, fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD, maupun fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Oleh karena itu telah ditetapkan target indikator kinerja perangkat daerah berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung melalui pelaksanaan program kegiatan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk menggambarkan capaian kinerja pelayanan yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung pada periode Renstra.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pada Tahun 2024, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung tercapai sebesar 3,55 (atau NIK 88,71) dari target yang ditetapkan sebesar 3,35 atau mencapai 105,97% dengan nilai kinerja kategori “Sangat Baik” (A). Jenis layanan pada survei Tahun 2024 sebagian besar terdiri dari Layanan Rapat Paripurna DPRD dan Layanan Koordinasi dan Konsultasi, dengan responden adalah masyarakat/ perorangan dan Anggota DPRD yang mendapat layanan tersebut. Indeks kepuasan masyarakat Tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan dan sama nilainya dengan Tahun 2023 yang mengindikasikan pelayanan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung pada Tahun 2024 sudah baik.

Faktor pendorong peningkatan kinerja tersebut dipengaruhi oleh unsur pelayanan yang dilaksanakan dengan baik oleh Sekretariat DPRD sebagaimana yang menjadi unsur penilaian dalam survey dimaksud yaitu: persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana serta penanganan pengaduan. Namun yang menjadi catatan untuk perbaikan selanjutnya adalah pelaksanaan survey kepuasan masyarakat pada Tahun 2024 melalui penyebaran pengisian kuesioner kepada responden belum masif dan intensif sehingga jumlah responden yang diharapkan belum terpenuhi, yang mana jumlah responden yang mengisi survey hanya berjumlah 32 orang yang terdiri dari laki-laki 19 orang dan perempuan 13 orang.

Berdasarkan hasil perhitungan IKM sebagaimana tersebut di atas, nilai rata-rata IKM per unsur pelayanan yang diperoleh Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
1	Persyaratan	3,406
2	Prosedur	3,469
3	Waktu Pelayanan	3,375
4	Biaya/Tarif	3,844
5	Produk Layanan	3,500
6	Kompetensi Pelaksana	3,531
7	Perilaku Pelaksana	3,531
8	Sarana dan Prasarana	3,563
9	Penanganan Pengaduan	3,750

Dilihat dari data di atas, diketahui bahwa nilai kinerja unsur pelayanan dengan kategori Sangat Baik (A) adalah Biaya/Tarif, Sarana dan Prasarana, serta Penanganan Pengaduan. Sedangkan nilai kinerja unsur pelayanan yang lain adalah kategori Baik (B) yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, dan Perilaku Pelaksana. Hal di atas tentunya akan menjadi perhatian dan evaluasi Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung untuk peningkatan kinerja pelayanan selanjutnya, khususnya nilai kinerja unsur pelayanan yang masih rendah seperti unsur Waktu Pelayanan walaupun berada dalam kategori Baik namun nilai kinerjanya paling rendah di antara unsur pelayanan lainnya.

Capaian kinerja nilai IKM Tahun 2024 yang melampaui target dipengaruhi oleh:

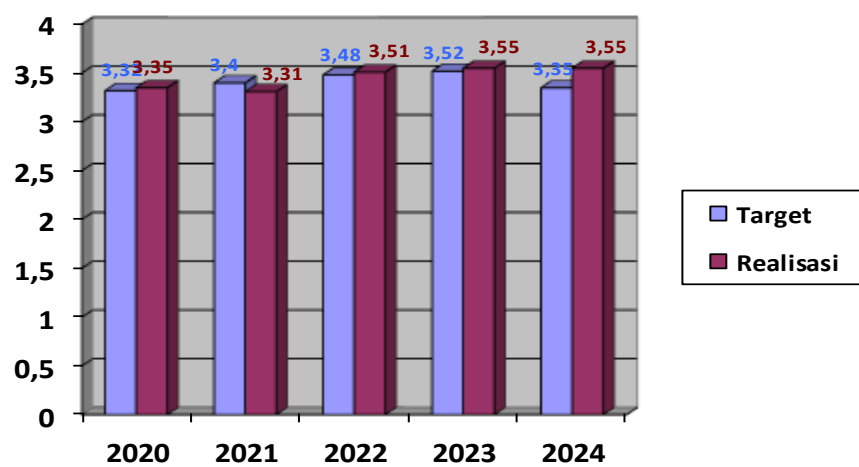
- a. SDM yang memadai dalam memberikan pelayanan;
- b. Sarana dan prasarana yang memadai;
- c. Tidak ada biaya pelayanan (gratis);
- d. Waktu pelayanan tidak terbatas hanya pada jam kerja.

Sedangkan faktor penghambat/ kendala pencapaian kinerja disebabkan karena:

- a. Dalam pelaksanaan pelayanan khususnya pelayanan pada pelaksanaan rapat DPRD ada kalanya pelaksanaan rapat tidak tepat waktu/ tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan;
- b. Masih kurangnya kebersihan dan kondisi beberapa sarana prasarana pelayanan yang sering mengalami kerusakan menjadi keluhan pengguna layanan;
- c. Dalam hal pelaksanaan survey kepuasan masyarakat Tahun 2024, belum ada petugas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung yang khusus mengelola dan mengkoordinir pelaksanaan survey kepuasan masyarakat sehingga penyebaran kuesioner tidak maksimal.

Realisasi nilai IKM Tahun 2020-2024 disajikan pada grafik berikut:

Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2020-2024



Indikator Persentase Fasilitas Pelaksanaan Kegiatan DPRD

Pada Tahun 2024, capaian indikator kinerja sasaran “Persentase fasilitas pelaksanaan kegiatan DPRD” diperoleh sebesar 91,50%. Fasilitas yang diberikan adalah kegiatan yang berhubungan dengan fungsi-fungsi DPRD sesuai dengan agenda Badan Musyawarah DPRD. Capaian kinerja kegiatan fasilitas DPRD tercermin dari laporan realisasi kinerja kegiatan/sub kegiatan fasilitas DPRD berdasarkan rencana kegiatan yang ditetapkan pada agenda Bamus DPRD tersebut.

dengan uraian sebagai berikut:

Capaian Indikator Persentase Fasilitas Pelaksanaan Kegiatan DPRD Tahun 2024

No	Uraian Kegiatan Fasilitas DPRD	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
1	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	6 Laporan	7 Laporan	116,67
2	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	50,00
3	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00
4	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	25 Dokumen	25 Dokumen	100,00
5	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	75 Dokumen	80 Dokumen	106,67
6	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	7 Orang	100,00
7	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00
8	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan	5 Laporan	41,67
9	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00

10	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00
Rata-Rata Capaian Kinerja = (915,01% : 10)					91,50%

Realisasi nilai indikator kinerja sasaran Tahun 2024 “Persentase fasilitasi pelaksanaan kegiatan DPRD” sebesar 91,50% tersebut tidak diperbandingkan dengan realisasi Tahun 2023 karena nomenklatur sasaran dan indikator yang berbeda. Adapun nomenklatur sasaran strategis tahun lalu (Tahun 2023) pada periode Renstra 2019-2023 adalah “Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD yang Berkualitas” dengan indikator “Persentase realisasi fasilitasi fungsi–fungsi DPRD”. Realisasi nilai Indikator persentase realisasi fasilitasi fungsi–fungsi DPRD Tahun 2023 adalah sebesar 100%.

Faktor pendorong capaian kinerja persentase fasilitasi pelaksanaan kegiatan DPRD Tahun 2024 dipengaruhi oleh:

- a. Ketersediaan SDM pelaksana kegiatan dan sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan;
- a. Penyediaan tenaga ahli dalam penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah;
- b. Adanya koordinasi dan kerjasama dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM dan pihak terkait lainnya dalam rangka penyusunan dan pembahasan Raperda;
- c. Adanya kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka peningkatan kapasitas DPRD, publikasi dan dokumentasi DPRD serta dukungan tenaga ahli fraksi dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas DPRD;
- d. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara bagian pada Sekretariat DPRD, antara pegawai Sekretariat DPRD dengan Anggota DPRD Kabupaten Belitung, dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan reses DPRD dan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi tugas DPRD.

Sedangkan faktor penghambat/ kendala pencapaian kinerja disebabkan karena:

- 1) Belum terselesaikannya Raperda Inisiatif DPRD terkait pertanahan pada akhir Tahun 2024 dikarenakan masih berproses dan sudah selesai pada tahap kajian akademis, sehingga hanya 1 Raperda Inisiatif DPRD yang telah selesai pada Tahun 2024;
- 2) Belum adanya pegawai pada Sekretariat DPRD sebagai penyusun dan perancang peraturan perundang-undangan;
- 3) Sedikitnya jumlah kunjungan kerja DPRD dalam daerah yang pada Tahun 2024 kunjungan kerja dalam daerah hanya dilakukan pada akhir Tahun 2024;
- 4) Keterbatasan pegawai tenaga pendamping/ fasilitasi Anggota DPRD dengan volume koordinasi dan konsultasi DPRD yang cukup tinggi.

Sedangkan realisasi kinerja Tahun 2024 berdasarkan indikator kinerja program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung diuraikan sebagai berikut:

Target dan Capaian Kinerja Program:

No	Indikator Kinerja Program (Eselon III)	Target Kinerja 2024	Capaian Kinerja 2024	%	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (%) (DO: Jumlah capaian kinerja Sub Kegiatan/Jumlah Sub Kegiatan)	100%	100%	100,00	<i>Tercapai</i>
2	Indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah (%) (DO: Hasil pengukuran IP ASN bagian Umum dan Kepegawaian)	75,44	85,76	113,68	<i>Tercapai</i>
3	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah (%) (DO: Jumlah capaian kinerja Sub Kegiatan/Jumlah Sub Kegiatan)	100%	100%	100,00	<i>Tercapai</i>
4	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (%) (DO: Jumlah capaian kinerja Sub Kegiatan/Jumlah Sub Kegiatan)	100%	83,33%	83,33	<i>Tidak tercapai</i>
5	Persentase Pelayanan Administrasi DPRD (%) (DO: Jumlah capaian kinerja Sub Kegiatan/Jumlah Sub Kegiatan)	100%	100%	100,00	<i>Tercapai</i>
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD: Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (%) (DO: Jumlah capaian kinerja Sub Kegiatan/Jumlah Sub Kegiatan)	100%	88,70%	88,70	<i>Tidak Tercapai</i>

Target dan Capaian Kinerja Kegiatan:

No	Indikator Kinerja Kegiatan (Eselon III)	Target Kinerja 2024	Capaian Kinerja 2024	%	Ket
1	Dokumen hasil perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00	<i>Tercapai</i>
2	Dokumen Keuangan Perangkat Daerah (Dokumen)	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	<i>Tercapai</i>
3	Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah (Orang)	24 Orang	24 Orang	100,00	<i>Tercapai</i>
4	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah (%)	100%	100%	100,00	<i>Tercapai</i>
5	Jenis barang milik daerah (Jenis)	3 Jenis	2 Jenis	66,67	<i>Tidak Tercapai</i>

6	Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	100%	100%	100,00	<i>Tercapai</i>
7	Barang milik daerah dalam kondisi baik (Jenis)	4 Jenis	4 Jenis	100,00	<i>Tercapai</i>
8	Tersedianya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD (%)	100%	100%	100,00	<i>Tercapai</i>
9	Tersedianya layanan administrasi DPRD (%)	100%	116,67%	116,67	<i>Tercapai</i>
10	Laporan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD (Dokumen)	12 Dokumen	11 Dokumen	91,67	<i>Tidak Tercapai</i>
11	Laporan hasil peningkatan kapasitas DPRD (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	100,00	<i>Tercapai</i>
12	Pokok-pokok pikiran DPRD (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	<i>Tercapai</i>
13	Laporan fasilitasi tugas DPRD (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	100,00	<i>Tercapai</i>

Penjelasan capaian masing-masing Indikator Kinerja Program pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2024 sebesar 100% sama dengan realisasi Tahun 2023. Capaian indikator kinerja program ini adalah capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan persentase tingkat capaian indikator kinerja 100% dan penggunaan SDM sebanyak 6 orang;
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan persentase tingkat capaian indikator kinerja 100% dan penggunaan SDM sebanyak 5 orang.

Faktor pendukung keberhasilan capaian indikator program ini adalah ketersediaan sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan dan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi yang membina/ mengkoordinir dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan.

Faktor penghambat/kendala pencapaian indikator program ini adalah:

- 1) Kurangnya dukungan dari bidang/bagian dalam penyiapan data penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan menyebabkan sering terlambatnya penyampaian dokumen;
- 2) Keterbatasan SDM yang melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan dalam waktu bersamaan.

Strategi/rencana tindak peningkatan capaian kinerja/ mempertahankan kinerja indikator persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan tersebut antara lain yaitu:

- 1) Mengoptimalkan pelaksanaan tahapan perencanaan dengan baik sesuai dengan waktu pelaksanaannya sehingga dokumen dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

- 2) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak yang berperan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan.
2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun 2024 sebesar 85,76 sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu dari target sebesar 75,44 dan meningkat dari Tahun 2023 yaitu sebesar 75,73. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung.
- Capaian indikator kinerja program ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan persentase tingkat capaian indikator kinerja 100% dan penggunaan SDM sebanyak 24 orang.

Faktor pendukung capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah antara lain yaitu:

- 1) Tersedianya sarana/wadah dalam bentuk kegiatan pengembangan kompetensi pegawai (diklat/bimtek) yang mendukung peningkatan indeks profesionalitas ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung;
- 2) Meningkatnya jumlah pegawai yang mengikuti diklat/bimtek pada Tahun 2024;
- 3) Komitmen ASN untuk mencapai penilaian kinerja yang baik dan tidak melakukan tindakan yang melanggar disiplin.

Faktor penghambat/kendala pencapaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah yaitu:

- 1) Masih adanya beberapa pegawai yang kurang berminat dan belum bersedia untuk mengikuti diklat/bimtek ataupun peningkatan kualifikasi pendidikan di jenjang pendidikan formal;
- 2) Masih adanya pejabat yang belum mengikuti peningkatan kompetensi jabatan.

Strategi/rencana tindak peningkatan capaian kinerja untuk Indikator Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah yaitu:

- 1) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak yang berperan dalam proses peningkatan capaian Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah.
- 2) Mengirimkan pegawai untuk meningkatkan kompetensi melalui Diklat/Bimtek sesuai dengan bidangnya.
- 3) Menjaga komitmen pegawai agar tidak melakukan tindakan yang melanggar disiplin dan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja.

3. Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah tercapai 100% dari target yang ditetapkan Tahun 2024 sebesar 100% dan sama dengan realisasi Tahun 2023. Capaian indikator kinerja program ini adalah capaian dari pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan persentase tingkat capaian indikator kinerja 100% dan penggunaan SDM sebanyak 8 orang.
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan persentase tingkat capaian indikator kinerja 100% dan penggunaan SDM sebanyak 33 orang.

Faktor pendukung keberhasilan capaian indikator program ini adalah ketersediaan SDM pelaksana kegiatan dan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar pegawai/bagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung dan koordinasi dengan penyedia jasa sehingga kebutuhan administrasi perkantoran dapat terpenuhi.

Faktor penghambat/kendala pencapaian indikator program ini yaitu adanya perubahan-perubahan jadwal kegiatan/rapat DPRD dan belum maksimalnya proses pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Strategi/rencana tindak peningkatan capaian kinerja/ mempertahankan kinerja indikator persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah tersebut adalah dengan meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak yang berperan dalam proses pelayanan administrasi perkantoran.

4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur terealisasi sebesar 83,33% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2024 sebesar 100%, dan mengalami penurunan dari realisasi Tahun 2023 yaitu sebesar 88,89%. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target indikator program ini dan menurun dari tahun sebelumnya karena terdapat kegiatan/pekerjaan yang sudah direncanakan pada perubahan APBD Tahun 2024 tidak dapat terlaksana yaitu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas yang dianggarkan untuk mengakomodir penyediaan kendaraan bagi Pimpinan DPRD masa jabatan Tahun 2024-2029. Kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana dikarenakan jenis/type kendaraan yang sesuai kebutuhan Ketua DPRD Kabupaten Belitung belum dapat disediakan oleh vendor/penyedia sampai dengan akhir tahun 2024 karena proses produksi, sedangkan penyediaan kendaraan perorangan dinas bagi Wakil Ketua I dan II DPRD Kab.Belitung tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan surat pernyataan yang bersangkutan tidak akan menggunakan fasilitas kendaraan perorangan dinas.

Capaian indikator kinerja program ini adalah capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan persentase tingkat capaian indikator kinerja 66,67% dan penggunaan SDM sebanyak 5 orang.
- b. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan persentase tingkat capaian indikator kinerja 100% dan penggunaan SDM sebanyak 5 orang.

Faktor pendukung keberhasilan capaian indikator program ini adalah ketersediaan SDM pelaksana kegiatan dan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik secara internal maupun koordinasi dan konsultasi dengan pihak di luar Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung sehingga pemenuhan sarana dan prasarana dapat terpenuhi.

Faktor penghambat/kendala pencapaian indikator program ini adalah belum maksimalnya proses pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme pengadaan barang/jasa secara elektronik dan lambatnya memulai proses pengadaan barang/jasa menyebabkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak tepat waktu/tidak terlaksana yang mempengaruhi pemenuhan sarana dan prasarana aparatur.

Strategi/rencana tindak peningkatan capaian kinerja indikator persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur tersebut adalah dengan meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak yang berperan dalam proses pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dan mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana dengan kondisi anggaran yang ada.

5. Persentase pelayanan administrasi DPRD terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan Tahun 2024 sebesar 100%, sudah mencapai target yang ditetapkan dan mengalami kenaikan dari Tahun 2023 yaitu sebesar 94%. Capaian indikator kinerja program ini adalah capaian kinerja dari pelaksanaan 2 (dua) kegiatan yang terbagi ke dalam 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, dengan persentase tingkat capaian indikator kinerja kegiatan 100% dan penggunaan SDM sebanyak 7 orang, yang mendukung sasaran strategis 1 “Terwujudnya Pelayanan Sekretariat DPRD yang Berkualitas”.
 - b. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD, dengan persentase tingkat capaian indikator kinerja 116,67% dan penggunaan SDM sebanyak 57 orang, yang mendukung sasaran strategis 2 “Meningkatnya Dukungan Layanan dan Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD”.

Faktor pendukung capaian indikator program ini adalah adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar bagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pelayanan administrasi DPRD.

Faktor penghambat/kendala pencapaian indikator program ini adalah:

- 1) Tidak semua anggota DPRD yang melakukan medical check-up menyesuaikan dengan kesiapan dan kesediaan anggota DPRD;
- 2) Jadwal rapat DPRD yang tentatif dan sifatnya mendadak.

Strategi/rencana tindak peningkatan capaian kinerja indikator persentase pelayanan administrasi DPRD tersebut adalah dengan meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak yang berperan dalam proses pemenuhan kebutuhan layanan administrasi DPRD dan memaksimalkan ketersediaan SDM dan sarana prasarana dalam rangka meningkatkan layanan administrasi DPRD.

6. Presentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD tercapai sebesar 88,70% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2024 sebesar 100% dan mengalami penurunan dibandingkan capaian kinerja Tahun 2023 yaitu 100%. Capaian indikator kinerja program ini ditunjukkan dengan capaian realisasi Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang telah disusun dalam bentuk dokumen Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD sebanyak 1 (satu) Dokumen dan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah sebanyak 10 (sepuluh) Dokumen, serta terlaksananya fungsi alat kelengkapan DPRD lainnya pada Tahun 2024, melalui dukungan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, dengan persentase tingkat capaian indikator kinerja 91,67% dan penggunaan SDM sebanyak 12 orang.
- b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD, dengan persentase tingkat capaian indikator kinerja 100% dan penggunaan SDM sebanyak 12 orang.
- c. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, dengan persentase tingkat capaian indikator kinerja 100% dan penggunaan SDM sebanyak 57 orang.
- d. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD, dengan persentase tingkat capaian indikator kinerja 100% dan penggunaan SDM sebanyak 9 orang.

Faktor pendukung keberhasilan capaian indikator program ini adalah:

- 1) Ketersediaan SDM pelaksana kegiatan dan sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan;
- 2) Dukungan tenaga ahli dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas DPRD;
- 3) Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara bagian pada Sekretariat DPRD, antara pegawai Sekretariat DPRD dengan Anggota DPRD Kabupaten Belitung, dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Faktor penghambat/kendala pencapaian indikator program ini menyebabkan belum optimalnya kinerja Sekretariat DPRD adalah:

- 1) Belum terselesaikannya Raperda Inisiatif DPRD terkait pertanahan pada akhir Tahun 2024 dikarenakan masih berproses dan sudah selesai pada tahap kajian akademis, sehingga hanya 1 Raperda inisiatif DPRD yang telah selesai pada Tahun 2024. Masih adanya kekuranglengkapan berkas/dokumen usulan Raperda dari OPD pengusul dan kurangnya komitmen dari pemangku kepentingan terhadap jadwal yang sudah ditetapkan sehingga penundaan pembahasan Raperda;
- 2) Belum adanya pegawai pada Sekretariat DPRD sebagai penyusun dan perancang peraturan perundang-undangan;
- 3) Sedikitnya jumlah kunjungan kerja DPRD dalam daerah yang pada Tahun 2024 kunjungan kerja dalam daerah hanya dilakukan pada akhir Tahun 2024;
- 4) Keterbatasan pegawai tenaga pendamping/fasilitasi Anggota DPRD dengan volume koordinasi dan konsultasi DPRD yang cukup tinggi.

Strategi/rencana tindak peningkatan/ mempertahankan capaian kinerja indikator persentase peningkatan fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya tersebut adalah dengan meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD termasuk fasilitasi penyediaan tenaga ahli dan memaksimalkan ketersediaan SDM dan sarana prasarana dalam rangka meningkatkan pelayanan tugas dan fungsi DPRD.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan tentunya harus didukung dengan peran Sekretariat DPRD yang mampu melaksanakan fungsinya dengan baik, dengan demikian peran Sekretariat DPRD sangatlah penting terhadap pencapaian kinerja DPRD.

Sesuai dengan tugas dan fungsi dalam memfasilitasi dan memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, maka peran Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung dituntut untuk semakin cepat, tepat, dan mampu meletakkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terlebih lagi dengan semakin besarnya volume kegiatan DPRD dan tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan Anggota DPRD. Inilah yang menjadi permasalahan utama pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung yakni belum optimalnya dukungan pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, aparatur yang handal dan berkompeten sesuai bidangnya, serta pendanaan yang cukup, tanpa

didukung hal tersebut maka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan seringkali mengalami kendala/hambatan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung pada saat ini sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Belitung sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki, walaupun ada beberapa kondisi yang masih perlu mendapatkan perhatian yaitu masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung yang memiliki kompetensi di bidangnya seperti perancang Peraturan Daerah, notulen/pendamping Anggota DPRD dan protokoler, yang menyebabkan belum maksimalnya pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Dari beberapa faktor permasalahan yang telah dikemukakan di atas terkait pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka rumusan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD;
2. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas DPRD;
3. Peningkatan kapasitas anggota DPRD;
4. Pengoptimalan peran koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung berkeinginan untuk mewujudkan pelayanan yang baik, dalam pengertian pelayanan yang dilakukan secara cepat, tepat dan memuaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama menyangkut bidang layanan administrasi (administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan administrasi rapat-rapat/persidangan) serta penyediaan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD, sehingga diharapkan nantinya dapat mendukung kelancaran lembaga DPRD Kabupaten Belitung didalam menjalankan fungsinya di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan. Berdasarkan rancangan Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026, tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang hendak dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan yang hendak dicapai selama kurun waktu 2024 – 2026 adalah:
Terwujudnya Pelayanan Sekretariat DPRD yang Berkualitas

- b. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai selama kurun waktu 2024 – 2026 adalah:
Meningkatnya Dukungan Layanan dan Fasilitas terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Penjelasan/ Rumusan	Target Kinerja pada Tahun ke		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Pelayanan Sekretariat DPRD yang Berkualitas	Meningkatnya Dukungan Layanan dan Fasilitas terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Nilai Survey Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Survey kepuasan anggota DPRD (Indeks Kepuasan= Total nilai persepsi per unsur/ Total unsur yang terisi x Nilai Penimbang)	3,35	3,40	3,45
			Persentase fasilitas pelaksanaan kegiatan DPRD	Jumlah rata-rata capaian kinerja kegiatan fasilitas DPRD	100%	100%	100%

3.2 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta Pendanaan

Dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini, Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung melaksanakan 2 (dua) program yang terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan yaitu sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah:

- a. Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.

Definisi operasional : $(\text{Jumlah dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan} / \text{jumlah dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan yang direncanakan}) \times 100\%$

Dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, indikator kegiatan: Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, indikator kegiatan: Dokumen keuangan perangkat daerah.

- b. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat daerah.

Definisi operasional : Hasil pengukuran Indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah sesuai dengan form pengukuran indeks profesionalitas ASN.

Dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ,
Indikator kegiatan: Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah.

- c. Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah

Definisi operasional : $\text{Rata-rata capaian pelayanan administrasi perkantoran (dilihat dari capaian kinerja fisik dari tiap sub kegiatan/ total sub kegiatan)}$

Dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Administrasi Umum Perangkat Daerah, indikator kegiatan: Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah.
- 2) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, indikator kegiatan: Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.

- d. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

Definisi operasional : $\text{Rata-rata capaian pemenuhan sarana prasarana aparatur (dilihat dari capaian kinerja fisik dari tiap sub kegiatan/ total sub kegiatan)}$.

Dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, indikator kegiatan: Jenis barang milik daerah.

- 2) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, indikator kegiatan: Barang milik daerah dalam kondisi baik.
- e. Persentase pelayanan administrasi DPRD
Definisi operasional : Rata-rata capaian pelayanan administrasi DPRD (dilihat dari capaian kinerja fisik dari tiap sub kegiatan/ total sub kegiatan).
Dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, indikator kegiatan: Tersedianya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD.
 - 2) Layanan Administrasi DPRD, indikator kegiatan: Tersedianya layanan administrasi DPRD.

II. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Indikator kinerja Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah: Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Definisi operasional : Rata-rata capaian kinerja program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (dilihat dari capaian kinerja fisik dari tiap sub kegiatan/ total sub kegiatan).

Dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, indikator kegiatan: Laporan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.
- 2) Peningkatan Kapasitas DPRD, indikator kegiatan: Laporan hasil peningkatan kapasitas DPRD.
- 3) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, indikator kegiatan: Pokok-pokok pikiran DPRD.
- 4) Fasilitasi Tugas DPRD, indikator kegiatan: Laporan fasilitasi tugas DPRD.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun 2025 memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta telah diselaraskan dengan dokumen Perubahan RKPD kabupaten Belitung Tahun 2025.

Pendanaan pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun 2025 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung dengan rencana pagu dana pada Perubahan Renja Tahun 2025 adalah sebesar **Rp.35.622.778.540,00** sebagaimana matrik terlampir.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) yang disusun oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang berjangka 1 (satu) tahun. Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja ini memberikan gambaran dan sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan 1 (satu) tahun ke depan dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD. Indikator-indikator kinerja beserta target dari setiap program dan kegiatan juga dituangkan sehingga pada akhir tahun anggaran pelaksanaannya dapat diukur. Penyusunan Renja dan Perubahan Renja Tahun 2025 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung selama Tahun Anggaran 2025 dan sebagai tolak ukur capaian kinerja organisasi baik secara tim, individu maupun institusi wadah organisasi. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreativitas aparatur secara disiplin untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah guna mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional, bersih dan berwibawa serta sebagai pelayan masyarakat yang baik.

TANJUNGPANDAN, JUNI 2025
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BELITUNG



IMAM FADLLI, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197109152001121002

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD KAB. BELITUNG TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SEKRETARIAT DPRD																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							46.074.714.749,00	42.207.353.511,00	35.622.778.540,00	-10.451.936.209,00							44.295.925.750,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							46.074.714.749,00	42.207.353.511,00	35.622.778.540,00	-10.451.936.209,00							44.295.925.750,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan				100 %	100 %	24.170.509.089,00	24.950.147.851,00	24.380.211.890,00	2.872.379.911,00							27.042.889.000,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen hasil perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	10.645.018,00	10.645.018,00	9.398.618,00	-1.246.400,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur		10.758.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	1.876.000,00	1.876.000,00	1.428.800,00	-447.200,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			1.900.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.312.018,00	3.312.018,00	2.512.818,00	-799.200,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			3.330.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			1.332.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.147.700,00	2.147.700,00	2.147.700,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			2.176.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	971.800,00	971.800,00	971.800,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	1.017.500,00	1.017.500,00	1.017.500,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			1.020.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen keuangan perangkat daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	4.238.707.500,00	4.287.899.500,00	4.287.899.500,00	49.192.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur		4.502.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/b ulan	29 Orang/b ulan	4.236.558.000,00	4.285.750.000,00	4.285.750.000,00	49.192.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			4.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.173.000,00	1.173.000,00	1.173.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			1.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	976.500,00	976.500,00	976.500,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah				24 Orang	29 Orang	253.320.000,00	220.000.000,00	157.000.000,00	-96.320.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur		336.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	13.320.000,00	0,00	0,00	-13.320.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			36.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	14 Orang	240.000.000,00	220.000.000,00	157.000.000,00	-83.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	1.323.363.961,00	1.598.632.043,00	1.187.840.392,00	-135.523.569,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur		1.395.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	69.983.835,00	69.983.835,00	59.269.005,00	-10.714.830,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	136.367.940,00	153.513.222,00	112.697.079,00	-23.670.861,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	59.969.526,00	59.969.526,00	46.831.788,00	-13.137.738,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	749.864.440,00	1.037.987.240,00	774.235.240,00	24.370.800,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	84.983.820,00	84.983.820,00	62.612.880,00	-22.370.940,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			85.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	72.194.400,00	72.194.400,00	72.194.400,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	120.000.000,00	60.000.000,00	-90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis Barang Milik Daerah				1 Jenis	2 Jenis	883.421.250,00	1.227.729.930,00	1.617.045.140,00	733.623.890,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur		350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	12 Unit	0,00	0,00	91.206.480,00	91.206.480,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				80 Unit	122 Unit	883.421.250,00	1.227.729.930,00	1.525.838.660,00	642.417.410,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran				100 %	100 %	1.224.085.200,00	1.224.085.200,00	1.190.907.000,00	-33.178.200,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur		1.262.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.952.000,00	2.952.000,00	2.952.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			4.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	358.500.000,00	358.500.000,00	358.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			358.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	862.633.200,00	862.633.200,00	829.455.000,00	-33.178.200,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dalam kondisi baik				4 Jenis	4 Jenis	801.124.000,00	945.314.000,00	760.236.000,00	-40.888.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur		2.147.650.000,00	SEKRETARIAT DPRD	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	17 Unit	145.819.000,00	290.009.000,00	128.951.000,00	-16.868.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			141.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				100 Unit	70 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	35.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				159 Unit	145 Unit	128.005.000,00	128.005.000,00	118.985.000,00	-9.020.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			132.650.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	477.300.000,00	477.300.000,00	477.300.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			1.824.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersedianya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD				100 %	100 %	14.836.350.000,00	14.836.350.000,00	14.631.350.000,00	-205.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	DPRD		16.437.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				25 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	13.913.100.000,00	13.913.100.000,00	13.913.100.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			15.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	375.750.000,00	375.750.000,00	360.750.000,00	-15.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			487.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				25 Orang	25 Orang	547.500.000,00	547.500.000,00	357.500.000,00	-190.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Tersedianya layanan administrasi DPRD				100 %	100 %	599.492.160,00	599.492.160,00	538.535.240,00	-60.956.920,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	DPRD		600.681.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				5 Laporan	5 Laporan	599.492.160,00	599.492.160,00	538.535.240,00	-60.956.920,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			600.681.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD				100,00 %	100,00 %	21.904.205.660,00	17.257.205.660,00	11.242.566.650,00	-4.651.168.910,00							17.253.036.750,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Laporan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				11 Dokumen	9 Dokumen	4.152.724.600,00	3.567.724.600,00	1.135.911.220,00	-3.016.813.380,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur dan DPRD		2.661.052.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.219.294.600,00	1.119.294.600,00	596.446.220,00	-622.848.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			861.052.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				9 Dokumen	7 Dokumen	2.933.430.000,00	2.448.430.000,00	539.465.000,00	-2.393.965.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			1.800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Laporan hasil peningkatan kapasitas DPRD				12 Laporan	12 Laporan	4.145.064.060,00	3.303.064.060,00	2.520.973.430,00	-1.624.090.630,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	DPRD		3.646.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				125 Dokumen	100 Dokumen	3.122.500.000,00	2.280.500.000,00	1.500.000.000,00	-1.622.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			2.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																			
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	7 Orang	293.476.260,00	293.476.260,00	293.476.260,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			336.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																			
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	729.087.800,00	729.087.800,00	727.497.170,00	-1.590.630,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			810.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Pokok-pokok pikiran DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	732.817.000,00	732.817.000,00	473.632.000,00	-259.185.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Masyarakat		945.984.250,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	12 Laporan	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																			
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				2 Dokumen	2 Dokumen	689.817.000,00	689.817.000,00	430.632.000,00	-259.185.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			875.984.250,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Laporan fasilitasi tugas DPRD				12 Laporan	12 Laporan	12.873.600.000,00	9.653.600.000,00	7.112.050.000,00	-5.761.550.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	DPRD		10.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	12.873.600.000,00	9.653.600.000,00	7.112.050.000,00	-5.761.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			10.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
		J U M L A H							46.074.714.749,00	42.207.353.511,00	35.622.778.540,00	-10.451.936.209,00						44.295.925.750,00			